



## KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2.	BANTEN POS	5.	BANTEN RAYA ✓	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3.	KABAR BANTEN	6.		MARET	23 JULI	NOVEMBER	
				APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

# Dewan Soroti Temuan BPK

**PIMPIN PARIPIURNA:**  
Ketua DPRD  
Kota Cilegon Isro  
Miraj memimpin  
rapat paripurna  
pengesahan Perda  
Pertanggungjawaban  
APBD 2023, Senin  
(22/7).



GUNAWAN/DUKA BANTEN RAYA

### Perda Pertanggungjawaban APBD 2023 Disahkan

CILEGON, BANTEN RAYA - Anggota DPRD Kota Cilegon menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada laporan pertanggungjawaban APBD 2023. Beberapa temuan BPK RI tersebut diantaranya terkait 40 kendaraan dinas yang tidak ditemukan keberadaannya, lalu proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR) Kota Cilegon yang hampir men-

capai Rp1 miliar, perjalanan dinas yang nilainya mencapai Rp633 juta dan lainnya.

Anggota Fraksi Persatuan Demokrat Bahaki Sulaiman mengungkapkan, meski sudah mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) dari BPK RI, masih ada sejumlah temuan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) dan harus diselesaikan oleh Pemkot Cilegon.

Kelvin 11



## KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i>	4.	<i>SATELIT NEWS</i>	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2.	<i>BANTEN POS</i>	5.	<i>BANTEN RAYA</i> ✓	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.		MARET	23 JULI	NOVEMBER	
				APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

### Dewan Soroti...

Dari hlm 12

"Ada temuan soal kendaraan, perjalanan dinas dan lainnya yang harus diselesaikan. Apalagi batas waktu 60 hari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) sudah terlewat. Beberapa itu belum dikembalikan ke kas daerah," katanya usai Rapat Paripurna Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, di DPRD Kota Cilegon, Senin (22/7).

Tidak hanya soal temuan BPK, Baihaki menyatakan, DPRD Kota Cilegon memberikan beberapa rekomendasi atau catatan yang diberikan, diantaranya potensi pendapatan yang belum maksimal digarap, penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum terealisasi, dan juga menggali potensi perekonomian dari potensi dan keunggulan budaya daerah.

"Ada empat catatan selain tentunya yang menjadi sorotan, yakni temuan dari BPK RI yang masih belum tuntas oleh pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Subhi menyampaikan, pihaknya sudah melakukan mekanisme beberapa tahapan dalam pengesahan Raperda menjadi Perda tersebut. "Mulai dari

pengajuan, pandangan umum fraksi, jawaban pandangan umum dan rapat antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah dilakukan, sehingga sekarang sudah disahkan," jelasnya.

Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan, pihaknya berterimakasih kepada DPRD Kota Cilegon yang sudah mengesahkan

laporan pertanggungjawaban tersebut. Kata dia, semuanya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. "Ini (Laporan pertanggungjawaban) bentuk transparansi, ini mencakup semua aspek dan kami mengapresiasi kejadian semuanya yang bekerja keras untuk merealisasikan berbagai program yang sudah dilakukan." ([uri/marjuki](#))